

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG HUKUMAN KEBIRI**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H. )

Oleh

Dirga Santosa

Npm : 1321020130

Program Studi : Siyasah

Pembimbing Akademik : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing Akademik: Dr. Siti Mahmudah, S.Ag,M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2017 M

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO 01 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) di Indonesia, dipandang sebagai ancaman yang serius oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkannya Perppu No. 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang semula diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, memberikan pemberatan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berupa sanksi kebiri kimia.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, apa dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, *Pertama*, untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri, *Kedua*, memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan skripsi ini maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut : *Pertama*, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Kedua*, dalam Hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : DIRGA SANTOSA

NPM : 1321020130

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

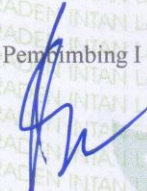
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-  
UNDANG PERPPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG  
HUKUMAN KEBIRI


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

  
**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 196706041997032004

Ketua Jurusan

  
**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
NIP. 195808171993031002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : JL. H. EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
PERPPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI**, disusun oleh  
**DIRGA SANTOSA**, NPM. 1321020130, Program Studi: **Siyasah**, telah diajukan  
dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada  
Hari/Tanggal: Rabu, 25 Oktober 2017

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I, M.Sy

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.



Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197009011997031002



## **MOTTO**

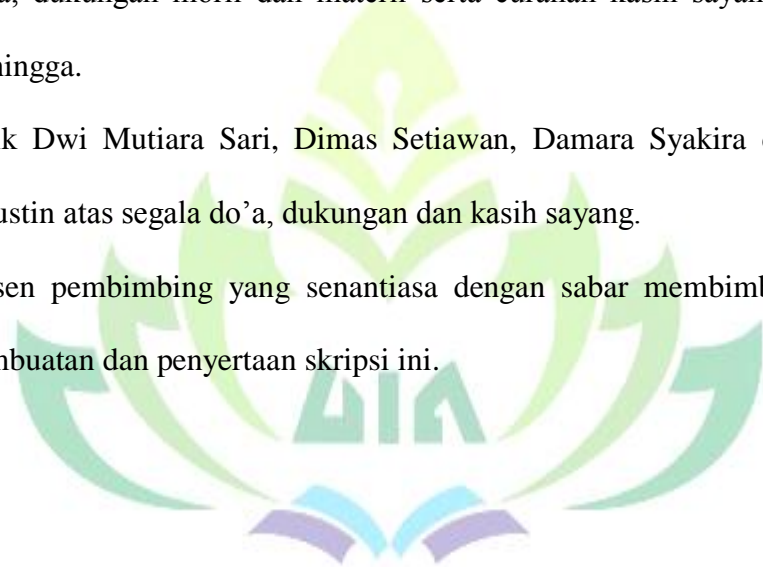
Adalah lebih baik menghindari perkara, karena berperkara berarti menang jadi arang, layu (kalah) jadi abu. Akan tetapi, sebaik-baiknya menghindari perkara adalah lebih bijaksana daripada main hakim sendiri.



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayah tercinta, Darsani dan Ibu tercinta, Suardah, atas segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Adik Dwi Mutiara Sari, Dimas Setiawan, Damara Syakira dan Merlin Agustin atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Dirga Santosa, putra pertama pasangan bapak Darsani dan Ibu Suardah. Lahir di Menggala, Kecamatan Menggala Kota pada tanggal 03 Agustus 1995. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu dua adik perempuan bernama Dwi Mutiara Sari dan Damara Syakira, satu adik laki-laki bernama Dimas Setiawan.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. TK Al-hidayah Menggala pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001
2. Madrasah Ibtida'iyah Negeri Menggala pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 01 Menggala pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 02 Menggala pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2013

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap PERPPU No 01 tahun 2016 tentang hukuman kebiri” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Pembimbing I dan Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



3. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
4. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.
5. Saudara-saudara selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Rofikul Umam, Rikki Dio Cahysa, Addit Adipaty, Jeffry Shandika, Yuriansyah, Thiomas Briliyan dan kanda yunda, adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Syariah UIN Raden Intan Lampung, Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Provinsi Lampung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
6. Sahabat-sahabatku Habiburrohman, Afrizal, Ridho mukhtaza, Heri Purwanto, Yunizar Arafat, Salman Afarezi, KKN Kelompok 185.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Siyasah B 2013.
8. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi, masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung, 03 Agustus 2017

Penulis,

Dirga Santosa





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8

## BAB II HUKUM KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PERPPU DAN HUKUM ISLAM

A. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Perppu	
1. Pengertian Hukuman Kebiri .....	12
2. Aspek Manfaat dan Mudarat Hukuman Kebiri .....	13
3. Pengaturan Hukuman Kebiri dalam Perppu .....	16
B. Hukum Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Sejarah Kebiri .....	21
2. Hukuman Kebiri .....	23
3. Pengaturan Hukum Kebiri dalam Islam .....	25

## BAB III PRO DAN KONTRA PENGATURAN HUKUM KEBIRI DALAM PERPPU NO 1 TAHUN 2016

A. Historitas Pengaturan Hukuman Kebiri .....	31
B. Substansi Pengaturan Hukum Kebiri dalam Perppu No 1 Tahun 2016.....	38
C. Beberapa Argumen Lahirnya Perppu No 1 Tahun 2016 .....	50
D. Akibat Lahirnya Peppu No 1 Tahun 2016 .....	62

## BAB IV ANALISA

A. Dasar Pertimbangan Pemerintah dalam Mengeluarkan Perppu NO 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 .....	71
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 .....	78
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI**”, dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah pandangan atau pendapat.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah :
  - a. “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat”.<sup>2</sup>
  - b. “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua beragama islam”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.183.

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1963, hlm. 60.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, , Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat peraturan dalam ajaran agama islam yang diupayakan oleh para ahli hukum dari nash Al-Quran dan Hadis yang mengatur tentang tingkah laku manusia.

1. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU)** adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>4</sup>
2. **Hukuman Kebiri** adalah hukuman yang dilakukan dengan tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2016.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan

<sup>5</sup> Patrick Barbier, *The World of the Castrati: the History of an Extraordinary Operatic Phenomenon* Souvenir, 1996, ISBN 0-0285-63309-0

## 1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- c. Belum ada yang memilih judul proposal ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

## C. Latar Belakang

Semakin marak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu yaitu yang disebut dengan tindak pedofilia. Tindakan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan, karena dampak yang timbul terhadap korbannya adalah seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat penyimpangan seksual, hal ini telah dianggap sangat meresahkan bagi orang tua, dimana anak-anak dijadikan sebagai sasaran.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Biro Hukum, *Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* roinfohumas@kemenkopmk.go.id

Dampak dari kasus pedofilia sangat besar, dimana korban yang masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan justru mendapatkan perilaku penyimpangan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum Pidana Indonesia sebagai dasar hukum yang berlaku, yaitu pasal 294 KUHP dan menurut Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah ditetapkan, namun kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak justru semakin meningkat tiap tahunnya.

Tindakan tersebut bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dilakukan oleh orang terdekat atau orang asing sekalipun sehingga korbannya tidak hanya satu bahkan bisa mencapai puluhan. Dalam Hukum Pidana Indonesia memang sudah ditentukan sanksinya.

Apabila melihat dari sudut pandang lain, hukuman yang sudah ditetapkan apakah dapat memberikan efek jera dan dipandang setimpal dengan perbuatan si pelaku yang membunuh keceriaan dan psikologi anak-anak.

Saking bencinya publik dengan kasus pedofilia dan kejahatan seksual yang terjadi di Tanah Air, sekelompok pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelakunya. Ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil bisa dicegah untuk memangsanya korban baru.

Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan, yakni



pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron. Cara ini sudah ditinggalkan di dunia modern karena dianggap menentang HAM.<sup>7</sup>

Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Namun, pada hakikatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al Istidzkar (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari (9/111), Imam Badruddin Al 'Aini dalam 'Umdatul Qari (20/72), Imam Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Alquran (5/334), Imam Shan'ani dalam Subulus Salam (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti

---

<sup>7</sup><http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> diakses tanggal 12 Januari 2017 pukul 17.57

mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah.

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

Dari pernyataan tersebut kemudian lahir suatu pandangan mengenai hukuman pedofilia dengan memberikan sanksi kebiri. Hukuman kebiri sudah di tetapkan beberapa negara Eropa dan sebagian negara Asia sebagai upaya menekan timbulnya korban.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang hukum kebiri sebagaimana diatur dalam Perppu No 1 Tahun 2016 ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Apa dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang.
  - b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang .
  - c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum.
- c. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang khususnya PERPPU No 1 Tahun 2016.
- d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>8</sup>Alasannya dalam mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) No 1 tahun 2016 untuk melahirkan tinjauan hukum islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada alasan – alasan terbentuknya PERPPU tersebut.

##### **1. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>9</sup> yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>8</sup>Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Cetakan Keempat Belas, Remaja Rosda Karya, 19 ), h. 3.

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987, hlm. 6.

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap PERPPU No 1 Tahun 2016, baik literatur primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari Al Qur'an, hadis, pendapat para ulama, Undang – Undang, PERPPU.

### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Muhanmmad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 19.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian<sup>11</sup> yang berkaitan.

### 4. Teknik Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>12</sup>

### 5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 236.

<sup>12</sup> Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 107.

penelitian, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No1 tahun 2016 tentang hukuman Kebiri menurut tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembentukan PERPPU No 1 tahun 2016 dan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir Induktif, yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik yang bersifat umum.<sup>13</sup>Metode ini pola pikir yang membahas persoalan berangkat dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat khusus, yakni ditarik secara umum yang mengenai PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri.

---

<sup>13</sup> Drs. Susiadi, M.Sos.I., *Metodologi Penelitian*,(Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAAIN Raden Intan Lampung 2015) hal. 4

## BAB II

### HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PERPPU DAN HUKUM ISLAM

#### A. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Perppu

##### 1. Pengertian Hukuman Kebiri

Kebiri (*al-ikhsha`*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, *testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.<sup>14</sup>

Pengertian Kebiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri memiliki arti sudah dihilangkan atau dikeluarkan (kelenjar testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan.<sup>15</sup> dari pengertian ini saja mungkin kita sudah merasa “risih” mendengarnya, apa gerangan jika seseorang yang hidupnya sudah dimandulkan, bagaimanakah kelanjutan hidupnya jika kelenjar testisnya sudah dihilangkan atau ovariumnya sudah dipotong. Tentunya seseorang yang diberikan hukum kebiri dia tidak mati, namun kesempurnaan hidupnya jelas tidak ada lagi.

---

<sup>14</sup><http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2017/01/hukum-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 14 juni 2017

<sup>15</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm .656.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiri atau kastrasi adalah sebuah metode medis yang dilakukan untuk menghalangi fungsi testikel secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron (bersifat permanen). Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, menyuntikkan obat-obatan yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

## 2. Aspek Manfaat dan Mudarat Hukuman Kebiri

Presiden Jokowi bertindak reaktif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002. Perppu ini lebih dikenal dengan sebutan Perppu kebiri, hal ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Komisi Nasional HAM menilai pengebirian melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu, Perppu kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif.<sup>17</sup>

Dari sudut pandang yang pro akan perppu ini, banyak *nitizen* di dunia maya yang berkomentar positif dan mendukung dijalankannya segera perppu ini. Agar menimbulkan efek jera bagi tersangka pemerkosaan dan menjadi

---

<sup>16</sup><https://makhluklemah.wordpress.com/2016/05/31/mengukur-kesaktian-hukum-kebiri>, diakses tanggal 15 januari 2017, 17:01wib

<sup>17</sup>*Tajuk rencana kompas*, diakses tanggal 15 januari 2017, 14:02 wib

ancaman serius bagi para laki-laki yang berkinginan melakukan tindak kekerasan seksual pada anak.

Sebelum pengesahaan perppu ini, telah marak dukungan kepada hukuman pengebirian kepada tersangka tindak kejahatan pedofilia ini. Dengan pengebirian ini diharapkan dapat menghiilangkan libido seksual, sehingga ketika keluar dari masa tahanan tersangka tak mengulangi kejahatan tersebut nantinya.

Akan tetapi hukuman kebiri dengan menyuntikan antiandrogen memiliki dampak negatif yaitu mengurangi kepadatan massa tulang sehingga berpotensi kepada pengeroposan tulang (osteoporosis) dan resiko patah tulang. Zat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan kadar lemak sehingga beresiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Disamping itu pengebirian secara kimiawai ini hanya bersifat sementara. Karena jika pemberian antiandrogen ini dihentikan, melalui jangka waktu tertentu dorongan seksual dan fungsi testis akan muncul kembali. Sehingga pengebirian bukan merupakan jalan akhir dalam upaya meredam nafsu pelaku kejahatan seksual, karena ketika masa tahanan pelaku selesai dan ketika efek antiandrogen berakhir, pelaku berpotensi mengulangi tindak kejahatan tersebut.

Berbagai pandangan juga menyoroti bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan bukan masalah hasrat libido semata. Hal ini dikarenakan seluruh manusia masing-masing memiliki hasrat libido.



Permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah mengenai libido tersebut, melainkan penyaluran hasrat tersebut secara benar atau tidak.

Hal ini sesuai dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan, Mariana Amiruddin.<sup>18</sup> Perppu ini dirasa tak memberikan solusi final. Karena kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata akibat dari reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku.

Sesuai dengan konsideran Perppu tersebut, alasan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. "Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Semua terganggu.

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan testosteron.

Menurut Ryu, kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakitkan seseorang. Sebab, orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak

---

<sup>18</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak-menjamin-efek-jera-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-termasuk-perkosaan/diakses> tanggal 14 juni 2017

seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal," ucapnya.<sup>19</sup>Ryu juga mengatakan suntikan kebiri kimia tak lantas membuat seseorang tak melakukan pemerkosaan lagi. Juga tidak membuat pria jadi kemayu.

### 3. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Perppu

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:<sup>20</sup>

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>19</sup> Tempo.co diakses jum'at 27 januari 2017/10:06 WIB

<sup>20</sup> Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) hal. 3

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*")

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku

dipidanamati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi" *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."* )

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka



berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82A**

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## B. Hukum Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Sejarah kebiri

#### a). Sejarah kebiri di Tiongkok (RRC)

Sejarah hukum kebiri telah pernah diberlakukan pada era kerajaan dulu, tepatnya pada masa kekaisaran Raja Tiongkok (RRC sekarang).<sup>21</sup> Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan atau memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada dilingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya di potong. Dari kebiasaannya ini lah pula, kebiri menjadi suatu hukum yang sakral pada kekaisaran Tiongkok saat itu.

Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM - 1766 SM). Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://kumbangpadi.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri.html>, diakses tanggal 14 juni 2017

<sup>22</sup> <http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa,20januari 2017,20:47>

Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia kini, adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, Abad 15 Masehi.

b). Sejarah kebiri di Eropa dan Timur Tengah

Berbeda lagi jika kita melihat sejarah kebiri yang pernah juga berlaku pada Eropa dan Timur Tengah. Namun kebiri memiliki makna yang lain, kebiri dianggap sebagai simbol kemenangan atau kekuasaan. Pada saat itu kebiri dilakukan setiap ada peperangan oleh pihak yang menang terhadap pihak yang telah dikalahkan. Artinya, setiap perang usai, maka pihak yang menang memotong penis prajurit yang telah mati dengan anggap telah mendapatkan kekuasaan.

c). Sejarah kebiri di Mesir Kuno

Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediterania. Emaskulasi (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan.

d). Sejarah kebiri di masa Yunani Kuno

Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengkebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebiri itu pada Ephesus dan Sardis, mereka dihargai orang

karena kejujuran dan kesetiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermotimus, menjadi kepala kasim dari Xerxes (486-463).

#### e). Sejarah kebiri di Inggris

Di Inggris, Alan Turing yang dikenal sebagai sang pionir ilmu komputer juga dihukum kebiri kimiawi pada 1952. Soalnya, dia didakwa bersalah melakukan tindak homoseksualitas. Saat itu homoseksual merupakan perbuatan kriminal di Inggris. Saat ini hanya dikenal dua macam hukum kebiri yaitu kebiri secara fisik dan kebiri secara kimiawi. Perbedaannya adalah jika kebiri fisik langsung menghilangkan testisnya dengan cara operasi, sedangkan kebiri secara kimiawi yaitu memberi suntikan zat kimia pada alat kelamin yang berfungsi menghilangkan hasrat seksualnya.

Dan telah ada beberapa negara yang sudah menerapkan hukum kebiri bagi warganya yang melakukan kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual bagi anak, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Korsel dan beberapa negara lainnya.

## 2. Hukuman Kebiri

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Menghilangkan fungsi testis dapat dilakukan dalam dua cara, yakni dengan membuang testis ataupun melalui kebiri secara kimiawi. Akibat dari

kebiri adalah pria akan menjadi mandul, serta dorongan seksualnya akan hilang.

Menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hassanudin AF menilai hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri. Hassanudin menuturkan bahwa hukuman kebiri layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan seksual karena sudah meresahkan hingga saat ini. Hassanudin juga berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukuman kebiri termasuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Gus Reza Achmad Zahid selaku ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Beliau mengungkapkan bahwa tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri bagi warga masyarakatnya, hal tersebut didasari karena di dalam konsep Islam tidak mengenal hukuman kebiri.

Namun terlepas dari argument-argumen yang berisi dukungan terhadap diberlakukannya hukuman kebiri, pada dasarnya di dalam pandangan Islam dengan didukung beberapa alasan menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi manusia adalah haram hukumnya.

---

<sup>23</sup><http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>, diakses tanggal 14 juni 2017

### 3. Pengaturan Hukum Kebiri Dalam Islam

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>24</sup>

Dalil untuk itu adalah Alquran dan Sunnah. Dalil Alquran antara lain firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالَّذِينَ وَلِحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}

(artinya), ”Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al Baqoroh 173).

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan *hujjah* oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khaththab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.<sup>25</sup>

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman had baginya, sesuai ayat, “Tetapi barangsiapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah :173). Tidak ada seorang ulama pun yang

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2 hlm. 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.18

<sup>25</sup>Ibid



menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajibnya mahar baginya. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat wajibnya mahar baginya, sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak wajib mahar baginya.<sup>26</sup>

Orang yang menjadi korban pelacuran adalah orang yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul.<sup>27</sup> Secara syar'i ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan ta'zir dengan ta'dib (pendidikan).<sup>28</sup>

Fathi ad-Durani (Guru Besar Fikih di Universitas Damaskus, Suriah) mendefinisikan ta'zir adalah “hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemashlahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat. Perbuatan maksiat dapat berupa meninggalkan perbuatan wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum,

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).h. 578.

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan MOhd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syari'ah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur : Zebra Editions, 2003), hlm. 277.

<sup>28</sup> *Ibid.*

keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>29</sup>

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan .

1).Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha.

Berikut ini adalah hadits yang berisikan tentang larangan kebiri, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

Artinya: Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori, no 4615)

Syekh 'Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab Al-Ahkam Al-

Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syawahat, yang berbunyi:

اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ مُحْرَمٌ وَلَا يُجُوزُ

Artinya: "Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh."

2).Syariah islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan

---

<sup>29</sup>Ibid

(haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33): 36, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الْأَحْزَابُ: 33}

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual yaitu:

- (1) Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah zina, makanya hukumannya adalah hukuman bagi pezina yakni hudud, yaitu dirajam jika sudah menikah (muhsan), dan dicambuk seratus kali jika belum menikah (ghairu muhsan).
- 2)jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati.

(3) jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau liwath, maka hukumannya adalah ta'zir.

Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) telah ditetapkan di dalam syariat Islam, namun bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukum ta'zir, adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menetapkan hukuman ta'zir haruslah hukuman yang tidak dilarang oleh syariat Islam, sedangkan disini kebiri merupakan sesuatu yang telah dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadikan kebiri sebagai hukuman ta'zir adalah tidak boleh (haram).

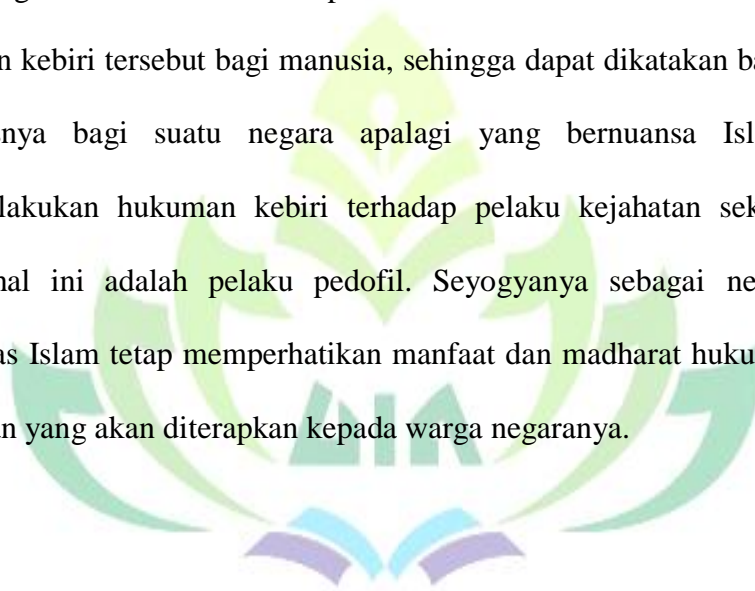
3).Metode kebiri terdapat dua macam, metode potong dan metode injeksi. Dan metode kedua ini yang sangat tidak diperbolehkan dalam islam, karena metode injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan di dalam islam juga telah tegas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ

مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhori no 5546).*

Dari beberapa penjelasan mengenai pro dan kontra tentang hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) tersebut, maka menurut hemat penulis adalah setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) adalah tidak boleh (haram). Hal tersebut didasarkan pada beberapa dalil yang menjelaskan tentang haramnya kebiri bagi manusia dan beberapa kemudharatan manakala diterapkannya hukuman kebiri tersebut bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sepantasnya bagi suatu negara apalagi yang bernuansa Islam untuk memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual yang dalam hal ini adalah pelaku pedofil. Seyogyanya sebagai negara yang mayoritas Islam tetap memperhatikan manfaat dan madharat hukum maupun ketentuan yang akan diterapkan kepada warga negaranya.



### BAB III

## PRO DAN KONTRA PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PERPPU NO 1 TAHUN 2016

#### A. Historitas Pengaturan Hukuman Kebiri

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak sebelum akhirnya ada hukuman kebiri, beberapa undang-undang yang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut :

”Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun “(**Pasal 287 ayat (1)**)<sup>30</sup>

“Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP)”

Bila dicermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang di alami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang

---

<sup>30</sup> Andi hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.115.



dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

## 2. Sanksi Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini :

**Pasal 81 :** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**Pasal 82 :** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## 3. Sanksi Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana di atur dalam Pasal 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

**Pasal 76E :** Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

**Pasal 82 ayat (1) :** Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 82 ayat (2) :** Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>31</sup>

Sebagaimana juga pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan, Ratna Batara Munti dalam artikel “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain bahwa Kitab Undang-

---

<sup>31</sup>R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, halaman 212

Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.<sup>32</sup>

Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Memang dalam pertanyaan tidak ada keterangan yang mengatakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika anak perempuan tersebut juga tidak mau dipegang bokongnya, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut.

---

<sup>32</sup>Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 05 februari 2017. Pukul 19.00 WIB

<sup>33</sup>*Ibid*

Namun, esensinya ancaman hukuman yang telah diregulasi dalam undang-undang *a quo* ternyata sama saja dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 di atas. Artinya, selama kedua undang-undang di atas factual tidak dapat efektif mencegah dan memberikan efek jera terhadap kejahatan kekerasan seksual.

#### 4. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 tahun 2016

Pada hakikatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan sanksi pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis sanksi pidana yang dalam Perppu No. 1 tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana pokok berupa pidana penjara
- b. Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati
- c. Pidana Tambahan

Berdasarkan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 tahun 2002, Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan Perppu No. 1 tahun 2016, jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Penulis melihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 tahun 2016 telah jelas jauh lebih berat dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, dan cukup mewakili rasa keadilan bagi korban.

Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami “*luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*” pelaku dapat

dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Bila dicermati, hukuman tersebut telah bersesuaian dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikatakan oleh P.AF. Lamintang : *pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Disamping itu, hemat penulis kebanyakan yang menyampaikan kritik atas terbitnya Perppu No. 1 tahun 2016 hanya terfokus pada hukuman kebiri yang sebenarnya hanyalah berupa pidana tambahan, bukan pidana pokok. Kebiri elektronik itu sendiri hanya akan diberikan apabila perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami “*luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*”. Artinya, Pembuat undang-undang hanya ingin memberikan pilihan bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan hukuman manakah yang dirasa cukup adil bagi si tertuduh melibat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Masalahnya adalah, teori hukum positif Indonesia sama sekali tidak mengizinkan hakim untuk menghukum seseorang jika opsi hukuman itu tidak diatur dalam *ius constitutum*. Lebih tegasnya, hakim hanya akan memutus sesuai dengan apa yang tertulis didalam undang-undang. Para Hakim hanya

diberikan kesempatan untuk menimbang hukuman yang dijatuhkan berdasarkan opsional berat dan ringan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Sekiranya, undang-undang hanya menentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dihukum pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka hukuman itu pula yang akan diputuskan oleh hakim. Persoalannya adalah, apakah hukuman itu cukup adil atau tidak adalah hal yang paling utama dibahas terlebih dahulu. Penulis setuju bahwa ancaman hukuman yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 mesti memperhatikan Hak Asasi Pelaku, tapi seyogyanya harus pula diperhatikan hak asasi korban yang telah dilanggar oleh si Pelaku.

Sistem hukum inilah yang dikenal dengan teori hukum positif (*Positivisme*) yang diajarkan oleh Hans Kelsen bahwa “hukum itu mesti dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya”. Dari unsur sosiologis berarti bahwa Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (sampai dikodifikasi menjadi *ius constitutum*). Ajaran Kelsen semata-mata hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis semata-mata yang sama sekali terlepas dari pada *das sein* atau kenyataan sosial, orang menaati hukum karena merasa wajib menaatinya sebagai kehendak negara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Lili Rasjidi. 1981. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti,halaman

## B. Subtansi Pengaturan Hukum Kebiri Dalam Perppu No 1 Tahun 2016

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016) oleh Presiden. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip elektronik*).<sup>35</sup>

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan momentum yang sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya dan teman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah

---

<sup>35</sup> Nasional.kompas.com, diakses 20 februari 2017, 11:25 wib



hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012- 2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual <sup>36</sup> Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah *incest*, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru <sup>37</sup> Data Catatan Tahunan (Catahu)2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada ranah personal mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 (dua) kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100 (seratus) kasus. Selain itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan, 53 persen (53%) kasus melibatkan anak sebagai korban, 43 persen (43%) sebagai pelaku, dan sisanya sebagai saksi <sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Komnasperempuan.or.id, diakses 20 februari 2017, 12:01 wib

<sup>37</sup> Dpr.go.id, diakses 21 februari 2017, 13:01 wib

<sup>38</sup> Arris trimaya, *mencermati pengaturan hukuman kebiri diIndonesia*, diakses 21 februari 2017, 13:022 wib

## 1. Latar Belakang Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan di atas) dan cara melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pada intinya mengubah dua pasal, yaitu :<sup>39</sup>

a). Pasal 81 yang menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

---

<sup>39</sup> Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) hal. 3

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

b). Pasal 82 yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip;

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain 2 pasal yang diubah, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga menambah satu pasal 81A dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2. Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016

### a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal

81 ayat (5). Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan.

Sampai saat ini penjatuhan pidana mati terhadap suatu tindak pidana masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati adalah bahwa penjatuhan pidana mati ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar.

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakekat sanksi, kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif. Sanksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman (Ratih Lestarini, 2007).

Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali. Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku



kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

#### b. Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan cip.

Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga

masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi<sup>40</sup>

Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang

---

<sup>40</sup> Health.kompas.com, 20 februari 2017, 14:15 wib

dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian chip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku paedofil, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga<sup>41</sup>

c. Pengecualian bagi pelaku anak

Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang menyatakan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

---

<sup>41</sup> News.detik.com, 21 februari 2017, 15:31 wib

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu peran lembaga lain (seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkannya keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual (Ismala Dewi, 2013).

### 3. Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang

Agar dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa persidangan kelima Tahun Sidang 2015-2016 ini. Perppu tersebut dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya DPR hanya akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan. Jika Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut langsung ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun, jika Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### C. Beberapa Argumen Lahirnya Perppu No 1 Tahun 2016

Kasus pedofilia terakhir melibatkan seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan sudah meninggal di dalam kardus. Dari laporan kepolisian ditemukan bukti-bukti pemerkosaan sebelum terjadi pembunuhan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau yang disebut Perppu Tentang Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak.

Terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.<sup>42</sup> Pemberatan hukuman dalam bentuk Kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok.

Sementara sejauh ini tidak banyak kasus Kekerasan Seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapatkan sanksi hukum maksimal.

---

<sup>42</sup> Pernyataan sikap komnas perempuan tentang hukum kebiri, *jakarta 26 mei 2016*, diakses 25 februari 2017, 16:18wib

Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespon desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penerbitan Perppu ini justru menunjukkan cara pandang negara terhadap persoalan Kekerasan Seksual yang sudah lama terjadi, hanya sebagai persoalan penjeratan pelaku semata, sementara faktor lain, seperti aspek yang menjadi penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan yang prima terhadap korban dan pemulihan tidak mendapat perhatian.

Dalam pandangan Komnas Perempuan, yang dibutuhkan untuk menjerakan pelaku Kekerasan Seksual saat ini adalah penegakan hukum yang serius, bebas mafia dengan memastikan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku, sebagaimana yang telah diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan kerap terjadi.

Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa, bisa berlangsung dalam waktu cepat dengan mengoptimalkan penerapan hukum yang sudah ada (termasuk hukuman seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada, untuk pemulihan korban dapat berjalan dalam waktu yang cepat, tepat dan mudah,

termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

Perppu Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak yang baru saja diubah pada tahun 2015, menunjukkan sikap reaktif dan parsial pemerintah terhadap penanganan kejahatan seksual yang seharusnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur. Pemerintah terkesan baru menyadari pentingnya penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual, padahal kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan telah lama terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Komnas Perempuan sudah menyampaikan bahwa setiap 2 jam, ada 3 perempuan (termasuk anak perempuan) menjadi korban kejahatan seksual sejak tahun 2013, bahkan Presiden RI sudah mencanangkan Darurat Kekerasan Seksual Anak sejak tahun 2014. Sayangnya data ini tidak menjadi pertimbangan ketika adanya Perubahan UU Perlindungan Anak dilakukan pada tahun 2015, sehingga harus dilakukan perubahan lagi pada tahun 2016 melalui Perppu.

Komnas Perempuan keberatan terhadap perbedaan respon atas Kekerasan Seksual terhadap anak dengan respon terhadap perempuan, yang memberi kesan satu tidak lebih penting dari lainnya. Padahal kerentanan perempuan terhadap perkosaan sama dengan kerentanan anak, dan dampak perkosaan terhadap perempuan tidak kalah buruknya dengan dampak perkosaan terhadap anak, karena masih adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang menimpa perempuan Indonesia baik dewasa maupun anak.



Di dalam program aksi komitmen kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala pada saat pertama kali dilantik menjadi presiden, terdapat pernyataan yang berkaitan dengan masalah Kekerasan Seksual yaitu bagaimana mengefektifkan pelaksanaan semua Undang Undang untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif, termasuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Seharusnya penanganan yang luar biasa untuk kejahatan luar biasa dapat diletakkan dalam kerangka ini.

Untuk itu Komnas Perempuan berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menimbang kembali pemberlakuan Perppu tersebut berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dan mensegerakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai payung hukum yang akan melindungi perempuan dan anak Indonesia dari Kekerasan Seksual serta memberikan keadilan bagi korban.

1. Beberapa Komentar – komentar menurut para ahli dan tokoh :<sup>43</sup>

Pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. "Yang sakit itu kan jiwanya. Kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Makanya

---

<sup>43</sup> [rappler.com/indonesia/110123](http://rappler.com/indonesia/110123), 26 februari 2017, 19:21 wib

saya kurang setuju dengan diberlakukannya itu," kata Boyke. Cara terbaik menghadapi pedofilia, menurut Boyke, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. "Kemudian anak-anak diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual,"

Alih-alih setuju, Seto Mulyadi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. "Mohon ini dipertimbangkan berdasarkan aspek kesehatan dan psikologisnya," Alasannya, secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi pelaku bukan sekadar menyasar kekerasan seksual, tetapi menyasar ke kekerasan segala-galanya.

Berbeda dengan praktisi kesehatan dan aktivis perempuan, Gubernur DKI Jakarta setuju dengan sikap pemerintah pusat. "Kalau ada undang-undangnya, sih, oke-oke saja. Cocok dong, dipotong saja (kemaluan pelaku kejahatan seksual),"

Jaksa Agung HM. Prasetyo menilai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa, atau *extraordinary crime*, sehingga harus ada pula penanganan proses penegakan hukum yang luar biasa. "Saya sendiri katakan bahwa kekerasan seksual itu sudah jadi kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa juga," ungkap Prasetyo. "Landasan hukum yang paling dinilai cepat, ya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Kalau revisi UU kan lama, makanya yang dianggap landasan paling cepat ya Perppu,"

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyambut baik usulan tersebut. Alasannya, hukuman tambahan itu dapat memberikan efek jera para predator anak."Diharapkan ada sanksi tambahan. Dalam rapat kemarin didiskusikan kemungkinan kebiri untuk paedofil karena kejahatan yang berulang harus diberikan efek jera,"

Hukuman tambahan tersebut nanti diusulkan masuk ke dalam Undang-undang atau mengeluarkan Perppu.Arist yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak.

Hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator, ditambah dengan diterapkan sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum. "Ini kami harapkan memberikan efek jera. Dikebiri ini bukan diputus hasrat seksual tetapi dikontrol sehingga tidak melakukan tindakan seksual,"

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta para pelaku kejahatan seksual dihukum mati karena penjara hanya membuat mereka lebih pintar melakukan kejahatan. <sup>44</sup>"Kejahatan seksual lebih miris dari kejahatan narkoba karena bisa merusak masa depan korbannya. Orang yang memperkosa anak kecil, masak cuma dihukum 9 tahun? Lebih baik hukum mati aja," kata Jimly di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Selasa, 24 Mei.

---

<sup>44</sup> Jimly assiddiqie ,minta-pelaku-kejahatan-seksual-dihukum-mati,rappler.com

Menurut Jimly, darurat kejahatan seks di Indonesia yang menimpa anak-anak di bawah umur harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah dengan cara memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. "Penjara saat ini semakin penuh, sekitar 40% pelaku tindak kejahatan yang telah terbebas, justru mereka lebih canggih dalam melakukan trik kejahatan. Hanya sedikit sekali yang benar-benar tobat setelah keluar dari penjara,"

Saat ini, para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah 18 tahun diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, menurut undang-undang perlindungan anak. Pemerintah disebut-sebut sedang merancang sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memperkenalkan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual, terutama para paedofil.

Tuntutan hukuman lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual muncul setelah seorang gadis berumur 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang, termasuk 7 anak-anak di bawah umur, di Bengkulu April lalu. Sejak saat itu, laporan pemerkosaan yang disertai pembunuhan anak perempuan di bawah umur terus bermunculan.

Jimly mendukung rencana pemerintah untuk menerapkan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual. Pelaku tindak kejahatan seksual, apabila dihukum penjara, kata Jimly, justru akan semakin pintar melakukan kejahatan berikutnya. Dan dengan sistim remisi - pengurangan masa hukuman karena kelakuan baik pada hari perayaan keagamaan - anggota masyarakat tidak takut melakukan kejahatan.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan maraknya kejahatan seksual yang menimpa anak-anak perempuan belakangan ini sangat memprihatinkan. "Kejahatan seksual ini adalah sesuatu yang memprihatinkan dan darurat, maka harus segera diambil langkah secara komperensif," kata Abdul Mu'ti di Kampus UMY pada Selasa, 24 Mei.

Menurut Abdul Mu'ti tidak menjelaskan langkah komprehensif yang dimaksud tetapi dalam kondisi seperti sekarang, para pelaku kejahatan harus diganjar dengan hukuman maksimum sesuai dengan undang-undang. Namun demikian, dia meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan hukuman kebiri karena masih banyaknya pro dan kontra di dalam masyarakat sendiri. "Hukuman kebiri itu ada yang pro dan ada yang kontra, dari sisi alasannya kenapa dibuat, kalau dibuat dengan Perpu, maka seharusnya itu dibuat karena memang keadaan yang genting dan memaksa dan juga dari sisi HAM," kata Abdul Mu'ti.

Kebiri tidak menjamin kejahatan terhadap perempuan, terutama terhadap anak-anak perempuan di bawah umur, akan berhenti karena pelaku bisa saja melakukan kejahatan dalam bentuk lainnya. *"Memang perlu ada kajian untuk tidak terburu-buru, apalagi reaktif dan emosional," kata Abdul Mu'ti.*<sup>45</sup>

Abdul Mu'ti juga mendorong adanya regulasi yang lebih tegas untuk media tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapat informasi. "Banyak hal yang ditayangkan media saat ini nyaris tanpa sensor dan itu dapat mendorong fantasi negatif bagi siapa saja yang menontonnya,"

---

<sup>45</sup> Abdul Mu'ti, *minta-pelaku-kejahatan-seksual-dihukum-mati*, rappler.com

*Setidaknya saya bisa sedikit lega mendengar ada putusan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual anak. Mengerikan sekali mendengar berita-berita yang beredar di media, soal kasus-kasus kekerasan seksual pada anak belakangan ini. Saya ingin pelakunya dihukum seberat-beratnya,”* ujar **Shinta** (34), dengan nada prihatin. Itulah salah satu respons masyarakat terhadap kabar Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>46</sup>

Kekhawatiran lain muncul dari Andina Septia (32), ibu dari seorang anak perempuan. Ia berharap, bentuk hukuman yang diberikan seharusnya bisa memberi dampak psikologis dan pelaku bisa menyadari kesalahannya. “Selain biayanya mahal, hukuman kebiri kimia tidak serta merta menghentikan risiko pelakunya akan berbuat jahat pada korban atau korban lain. Jangan-jangan dia malah sakit hati dan muncul rasa ingin balas dendam kepada korban,” tegas Andina.

Langkah pemerintah itu memang menuai berbagai respons. Dari polling yang dilakukan femina lewat Twitter @feminamagazine pada 46 responden, sebanyak 80% memilih setuju agar pelaku pemerkosaan dihukum kebiri. Sisanya, 11% tidak setuju, dan 9% mengaku tidak paham soal hukuman kebiri ini.

Psikolog dan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Elizabeth Santosa sangat mendukung langkah pemerintah ini. “Mari kita percayakan implementasi kebijakan ini pada pemerintah. Setelah berjalan satu hingga dua tahun, bisa kita evaluasi bersama, apakah peraturan

---

<sup>46</sup> Femina, *pro dan kontra hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak*, 27 februari 2017, 21:19 wib

itu efektif dan bisa mengerem terjadinya kejahatan kekerasan seksual.”Ia mengibaratkan keluarnya Perppu itu sebagai garis final sebuah maraton dari sebuah proses panjang kebijakan. Maraknya pemberitaan media terhadap kasus-kasus telah mendorong pemerintah merespons situasi darurat kekerasan seksual ini lebih cepat.

Meski demikian, Ketua SubKomisi Partisipasi Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Mariana Amiruddin punya pandangan lain. Ia berpendapat Perppu ini belum menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Hukuman suntik kebiri sebetulnya adalah terapi yang jadi bentuk rehabilitasi, bukan memberikan efek jera. Hukuman untuk pelaku kekerasan seksual seharusnya setara dengan hukuman pidana untuk penjahat kemanusiaan, misalnya hukuman seumur hidup. “Pelaku pemerkosaan harus mendapat rehabilitasi mental, bukan hanya membatasi libidonya. Seseorang memerkosa karena ingin menguasai korbannya. Bahkan, banyak pelaku perkosaan anak yang bukan paedofilia.”

Menurut Mariana, Perppu itu juga menunjukkan bahwa ada persepsi atas kejahatan kemanusiaan itu hanya berlaku untuk anak-anak. Padahal, kekerasan seksual rentan terjadi pada anak perempuan dan wanita dewasa. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat



kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

Pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespons desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. “Masih ada ratusan kasus pemerkosaan belum terselesaikan, bahkan belum sampai ke proses peradilan,” ujar Mariana.

Menyikapi hal itu, Komnas Perempuan berniat meminta Perppu tersebut ditinjau ulang oleh DPR. Jika akhirnya disetujui DPR, Perppu tersebut harus diubah dengan mengadopsi peraturan yang tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini posisinya masih dalam daftar Prolegnas tambahan 2016. Terlepas dari pro dan kontra yang beredar di masyarakat, Elizabeth mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempelajari isinya. “Jangan hanya fokus pada pengesahan kebijakannya. Mari bersama-sama meneliti setiap poinnya.”

Sementara itu Fraksi PKS, lewat juru bicaranya Ledia Hanifah menyatakan, tidak setuju perppu ini disahkan dengan beberapa catatan, antara lain bahwa penerapan hukuman kebiri bukan satu-satunya solusi untuk perlindungan anak.<sup>47</sup> “Kita melihat bahwa ada sejumlah hal yang berkaitan

---

<sup>47</sup> BBC Indonesia, *Perppu perlindungan anak*, 03 maret 2017, 21:09 wib

dengan ketetapan pemberatan hukuman dengan kebiri, kami melihat ini bukan satu-satunya solusi yang dapat dilakukan, kebiri bukan hukuman yang tepat," jelasnya.

Ledia mengatakan rumusan yang ada dalam perppu itu juga hanya sedikit memberikan perhatian terhadap rehabilitasi korban. "Rumusan yang ada dalam perpu, hingga teknis pelaksanaannya itu tidak seperti memberikan perlindungan yang paripurna kepada masyarakat. Perhatian terhadap korban justru sangat minim, hanya memberikan pemberatan hukuman pada pelaku. rehabilitasi korban tidak ada, pelaku malah dapat," katanya.

Fraksi PPP menyatakan setuju dengan pengesahan perppu sebagai solusi sementara untuk perlindungan anak. Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan akan segera membuat peraturan pemerintah untuk mengatur perppu yang telah disahkan jadi undang-undang tersebut.

Dalam perppu tersebut, dicantumkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, antara lain hukuman kebiri, mati, serta pemasangan chip elektronik bagi pelaku. Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah.

#### D. Akibat Lahirnya Perppu No 1 Tahun 2016

Mendapati fakta Komnas Perempuan, pada tahun 2012 jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan mencapai 216.156, pada 2013 menjadi 279.688, tahun 2014 menjadi 293.220 kasus, dan pada 2015 sudah lebih dari 320.000. Data ini merupakan sebuah fakta bahwa penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya bersumber dari ketidakmampuan laki-laki dalam meredam hasrat libidonya. Kita tak bisa menutup mata bahwa dampak kemiskinan, penggunaan alkohol dan zat adiktif, dan hubungan antar anak dan orang tua yang tak harmonis merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak.

Persoalan kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang sistematis dan tercipta akibat banyak faktor yang terjadi. Sehingga penyelesaian kasus ini tidak dapat disederhanakan hanya dengan melakukan kebiri dan penempatan cip pada tubuh pelaku. Melainkan perlu banyak tindakan pencegahan maupun hukuman yang saling berkait. Dimulai dengan menutup konten pornografi yang saat ini mudah sekali diakses di dunia maya, mengurangi angka ketimpangan kesejahteraan, pendidikan seksual yang perlu diberikan pada anak, agar anak-anak memiliki pemahaman berkaitan tentang seksualitas sehingga tidak mudah tertipu oleh rayuan pada orang dewasa.

Perlu pula upaya hukum untuk membatasi peredaran minuman keras agar tidak mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan, pemberantasan

narkoba dan berbagai zat adiktif lainnya. Dan tentunya perlu hubungan lebih dekat dari orang tua dan anak, karena kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Orang tua dapat memberikan pemahaman intensif kepada anak sehingga mampu untuk mencegah kasus kejahatan ini.

Satu bulan terakhir, media massa di Indonesia ramai memberitakan kasus pemerkosaan yang disertai kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap korban. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Dimulai dengan kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, Eno di Tangerang, bocah kelas IV SD di Jatinom, dan LN bocah 2,5 tahun di Bogor. Kenyataan ini menambah panjang daftar kekeserasan seksual di Indonesia.

Pasca berlakunya undang-undang tentang perlindungan anak, jumlah kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, pada tahun 2007 kekerasan seksual yang dialami oleh anak sejumlah 527 kasus, dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 626 dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 705 kasus.<sup>48</sup>

Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para pemerhati perlindungan anak mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah undang-undang perlindungan anak. Presiden Joko Widodo pun merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun

---

<sup>48</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009, diakses pada 3 maret 2017, pkl 16:16

2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut mengatur sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual: pidana minimal 5 tahun penjara, bahkan membuka ruang untuk dijatuhkan hukuman mati. Perppu juga mengatur pidana tambahan berupa: pengumuman di publik, sanksi kebiri kimiawi dan pemasangan chip. Pertanyaannya: apakah sanksi yang diatur dalam Perppu telah sesuai dengan alasan utama lahirnya Perppu tersebut? Selain itu dengan penambahan pemidanaan, apakah akan menimbulkan efek jera?

#### 1. Aspek Legislasi Perppu

Secara formal, proses penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat terbitnya suatu perppu. Syarat lahirnya perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa.<sup>49</sup> Mengenai batasan “kegentingan yang memaksa” sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter.

Pertama, adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menerbitkan perppu, seharusnya pemerintah berpedoman pada putusan MK tersebut. Dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tidak ada kebutuhan mendesak, apalagi kekosongan hukum. Sebab, masalah kejahatan seksual telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Menimbang Efek Jera

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.

- a. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan

seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;

c. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pembedaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Ini pandangan yang cukup keliru dan reaktif.

Efektivitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*). Padahal banyak penelitian menyajikan fakta bahwa cara berpikir seperti itu sangat keliru. Sanksi yang sangat tinggi ditambah pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri, dan pemasangan cip bagi pelaku kejahatan seksual belum memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Data dari *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau



hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera.<sup>50</sup> Selain itu tindakan kebiri kimia terhadap pelaku jika dilihat dari sisi medis, menurut Roslan Yusni Hasan dokter spesialis syaraf atau neurologi, pengenaan kebiri kimia justru menyakiti seseorang karena akan membuat kondisi hormon seseorang menjadi tidak seimbang, dan pelaku yang sudah dikebiri bisa kembali memperkosa meskipun libidonya rendah karena memorinya mengenai kekerasan seksual tetap masih ada, bahkan berpotensi lebih agresif dan memicu depresi.<sup>51</sup>

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang. Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal.

Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*, dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks.<sup>52</sup> Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa

---

<sup>50</sup><http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada 27 maret 2017, Pkl. 14:54 WIB

<sup>51</sup><https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif> diakses pada 27 Maret 2017, Pkl. 15:00 WIB

<sup>52</sup>*Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri), hlm. 7

atau sukarela, terdapat ketidaksamaan konsep antara kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.

Penggunaan bahasa cip oleh pembentuk perppu, juga tidak memberikan kejelasan berupa apa, tujuan apa dan sebagai langkah apa dilakukannya pemasangan cip tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak mencantumkan satupun kata cip. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata cip diartikan sebagai keping kecil bahan semikonduktor yang mengandung rangkaian elektronika dalam bentuk rangkaian padu.<sup>53</sup> Dengan demikian, tidak ada kejelasan makna terhadap penggunaan frasa “cip” dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Dari sisi keadilan bagi korban kekerasan seksual, data Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 53,9% dari 596 responden menyatakan bahwa dengan beragam jenis hukuman akan memberikan keadilan bagi pelaku. Sedangkan 40,4% menyatakan tidak memberikan keadilan bagi pelaku.<sup>54</sup>

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat penolakan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran

---

<sup>53</sup><http://kbbi.web.id/cip> diakses pada 27 maret 2017, Pkl. 15:44 WIB

<sup>54</sup> Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Juni 2016, hal. 5

(MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).<sup>55</sup>

Dengan kondisi demikian, menurut saya, tidak perlu dilakukan pemidanaan tambahan berupa kebiri. Sebab, jika tetap menerapkan sanksi tersebut, pemerintah harus memastikan obat-obat atau bahan kimia yang diperlukan untuk melakukan eksekusi. Jika pemerintah masih berasumsi dengan peningkatan pemidanaan akan berkolerasi dengan berkurangnya peluang terjadinya tindak pidana, penegakan hukum menjadi poin penting.

Disamping upaya penegakan hukum dalam undang-undang, sangat penting untuk memberikan pemahaman kembali pada tingkat masyarakat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab sosial. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

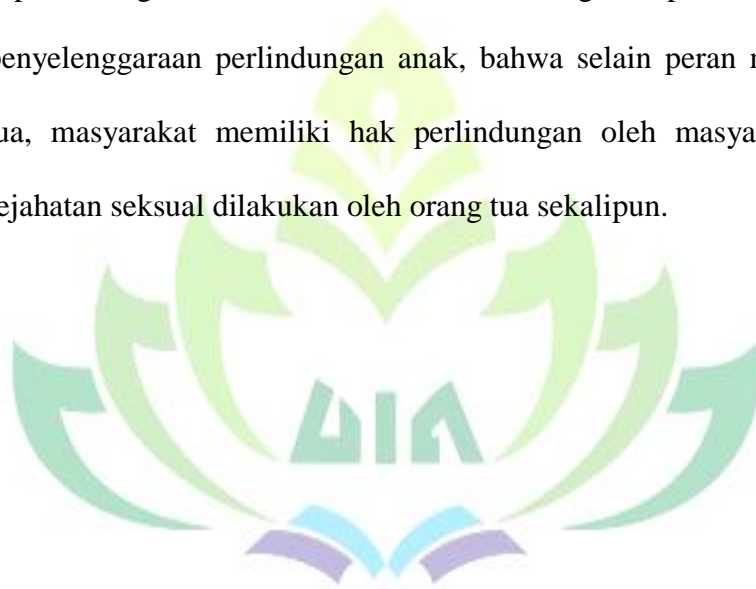
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas, bahwa sebanyak 34,7% menyatakan penyebab utama maraknya kekerasan seksual

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter Sebagai hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney bulan Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sya'ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 20-22 Mei, 1993.

adalah pengawasan dari orang tua/masyarakat kurang, 18,8% pendidikan seksual kurang lengkap dan 19,8% menyatakan hukuman kurang berat.<sup>56</sup>

Dengan demikian, upaya perlindungan preventif merupakan amanat undang-undang sebelum terjadinya kekerasan seksual bagi anak. Dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 25 bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa selain peran negara dan orang tua, masyarakat memiliki hak perlindungan oleh masyarakat baik ketika kejahatan seksual dilakukan oleh orang tua sekalipun.



---

<sup>56</sup> Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Juni 2016, hal. 6

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002**

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin marak dan bahkan sudah pada tahap mengahwatirkan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil sikap.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.<sup>57</sup>

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>57</sup>Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) hal v

Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Namun kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang namun hanya berlaku maksimal 2 tahun, sehingga apabila tidak menjadi Undang-Undang maka Perppu dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejatinya apa yang termuat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sudah mengakomodir berbagai aturan-aturan yang berkenaan dengan bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Memperhatikan bunyi aturan yang terdapat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya berisi 6 pasal, berarti tidak semua Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan perubahan, hanya Pasa-Pasal yang berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan perubahan secara seubtansial. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81, 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A :<sup>58</sup>

1. Pasal 81 Perppu No 1 Tahun 2016 menyatakan :

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*")

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>58</sup> Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) hal. 3



- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi" ***Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.***" )

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Berdasarkan isi Perppu No 1 Tahun 2016 Pasal 81A ayat 3 yaitu:

**Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi kebiri dalam Islam dikenal dengan Kebiri (*al ikhlas*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Merujuk dari definisi kekerasan seksual pada anak diatas jika Islam dapat qiyaskan dengan konsep zina dan liwath dengan paksaan oleh salah satu pihak yang ada. Ada banyak definisi terkait dengan zina dan liwat, salah satunya menurut *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji

karena zat nya tanpa adanya subhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat. Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama persis dengan pemerkosaan dalam praktiknya. Sedangkan liwat hampir sama dengan zina, yakni memasukkan alat kelamin (zakar) ke anus (dubur) sama halnya dengan praktek sodomi. dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa hukum dari zina dan liwat adalah haram.<sup>59</sup>

Beberapa ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi pihak yang dipaksa, dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة : 173}

*Artinya :Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya Q.S Al-baqoroh (1):173)*  
Dan surat Al-An'am ayat 119 ;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119}

*Artinya :Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Q.S Al-an'am (5):119)*

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005), Hlm 7

<sup>60</sup> Al-An'am: (5):119).

dalam kelompok “*jarimah hudud*”, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah – jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. Konsep tersebut, menurut H. A Djazuli, adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak. Disamping itu, untuk menumbuhkan anggapan bahwa, zina bukan hanya merugikan perseorangan tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan.<sup>61</sup> Ada tiga bentuk hukuman bagi penzina yaitu cambuk (dera atau jilid, pengasingan dan rajam).<sup>62</sup>

Maqasid asy-Syari’ah

Maqasid asy-Syari’ah atau tujuan hukum menurut al-syatibi pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Menurut al-syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.<sup>63</sup>

Fathi al-daraini mengatakan bahwa hukum – hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahroh, dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Maka agaknya tidaklah berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa Maqasid asy-Syari’ah

---

<sup>61</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005),Hlm.70.

<sup>62</sup> Ibid hlm 73.

<sup>63</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari’ah Menurut Syatibi* (jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 65.



al-Syatibi berupaya megespresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi.<sup>64</sup>

Maqasid asy-Syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum – hukum secara keseluruhan. Menurut Al-Syatibi apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensinya kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui Maqasid asy-Syari'ah yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.<sup>65</sup>

Kemaslahatan menurut al-syatibi dilihat dari dua sudut pandang; pertama *Maqasid al-syari'* (tujuan tuhan ), yang ke dua *Maqasid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Maqasid asy-Syari'ah dalam Maqasid al-syari', mengandung empat aspek yakni pertama tujuan dari syari'at adalah kemaslhatan manusia didunia dan akhirat. Kedua syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, ketiga syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.<sup>66</sup>

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur poko tersebut al-syatibi membagi kepada tiga Maqasid atau tujuan syari'ah yaitu : pertama Maqasid Al-daruriyat yakni yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua Maqasid al –

---

<sup>64</sup> Muhammad Abu Al-jafra, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 65.

<sup>65</sup> Ibid Hlm 68.

<sup>66</sup> Al-Muwafaqat, Jilid II Dikutip Dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 70.

hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemelihara terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga Maqasid al – tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>67</sup>

Tidak terwujudnya aspek Al- daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hijayat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Sedangkan aspek tahsiniyat membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek al-daruriyat antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek al- daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.<sup>68</sup>

Sehingga berdasarkan analisa diatas, Pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada halayak umum, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi pelaku namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan.

---

<sup>67</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syri'ah*, Hlm 72.

<sup>68</sup> Ibid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV tentang tinjauan hukum islam terhadap Perppu no 1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri sebagai berikut :
  - a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
  - c. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlusegera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Tinjauan hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman

kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- b. Hukum Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariat Islam itu.
- c. Metode kebiri yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

### **B. Saran**

Melihat berbagai pertimbangan di atas menurut hemat penyusun, pada dasarnya hukuman kebiri kimia kurang tepat jika dijadikan hukuman tambahan pada tindak kejahatan seksual terhadap anak. Walaupun tetap akan dijadikan hukuman maka harus benar – benar dikaji ulang sebelum dijatuhkan apakah latar belakang atau faktor yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut, kemudian dalam penerapannya dan pelaksanaan hukuman

pelaku tidak hanya diberikan suntikan antiandrogen saja yang ditunjukkan untuk melemahkan dorongan seksualnya, akan tetapi pelaku juga harus mendapatkan pembinaan dan pengobatan dari psikiater juga dan benar – benar di kontrol terus menerus hingga yang bersangkutan dinyatakan benar – benar sembuh.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya dipandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi terhadap korban. Maka, menurut penyusun harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan bagi pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat luas juga. Hukuman pokok juga dapat diberikan hukuman tambahan berupa denda yakni pembebanan biaya sebagai denda untuk pemulihan secara terapi psikologis kepada korban, dengan begitu korban dapat kembali seperti kondisi sediakala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000).
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005).
- Al-Muwafaqat, Jilid II Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Arris trimaya, *mencermati pengaturan hukuman kebiri diIndonesia*, diakses 21 februari 2017, 13:022 wib
- Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)
- Biro Hukum, *Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* roinfohumas@kemenkopmk.go.id
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro 2014).
- Drs. Susiadi, M.Sos.I., *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAAIN Raden Intan Lampung 2015)
- Dpr.go.id, diakses 21 februari 2017.
- Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1963.
- Ihsanudin, *kompas.com, jakarta*, diakses tanggal 28 januari 2017.
- Komnasperempuan.or.id, diakses 20 februari 2017.
- Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika, 2016)
- Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Cetakan Keempat Belas, Remaja Rosda Karya, 19 ).

Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter Sebagai hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948.

Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1981.

*Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri).

Muhammad Abu Al-jafra, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

Nasional.kompas.com, diakses 20 februari 2017

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Patrick Barbier, *The World of the Castrati: the History of an Extraordinary Operatic Phenomenon* Souvenir, 1996.

Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Juni 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: sinar Grafika, 2005)

Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Shukri Hanapi dan MOhd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syari'ah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur : Zebra Editions, 2003)

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987.



*Tajuk rencana kompas*, diakses tanggal 15 januari 2017.

Tempo.co diakses jum'at 27 januari 2017.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2

www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009, diakses pada 3 maret 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukum.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> diakses tanggal 12 Januari 2017 pukul 17.57

<http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2017/01/hukum-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 14 juni 2017

<https://makhluklemah.wordpress.com/2016/05/31/mengukur-kesaktian-hukum-kebiri>, diakses tanggal 15 januari 2017, 17:01wib

<https://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak-menjamin-efek-jera-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-termasuk-perkosaan>/diakses tanggal 14 juni 2017

<https://kumbangpadi.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri.html>,diakses tanggal 14 juni 2017

<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa,20> januari 2017,20:47

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>, diakses tanggal 14 juni 2017

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada 27 maret 2017, Pkl. 14:54 WIB

[https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-](https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif)

[kebiri-membuat-orang-lebih-agresif](https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif) diakses pada 27 Maret 2017, Pkl. 15:00

WIB

<http://kbbi.web.id/cip> diakses pada 27 maret 2017, Pkl. 15:44 WIB

